

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM SESUAI RPJMD 2011 - 2016
BERSERTA PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

NO	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Titik Nol)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Rendahan 2014		Permasalahan	Solusi	SKPD Penanggung jawab	
					Target Indikator	Capaian				
					I	URUSAN WAJIB				
19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM									
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang	a	Penegakan PERDA	%	50%	100%	Meskipun intensitas pelaksanaan operasi penegakan Perda sudah melebihi target yang ditetapkan, tetapi kasus pelanggaran Perda semakin bertambah	Intensitas operasi penegakan perda terus ditingkatkan disertai peningkatan sosialisasi dan penyuluhan Perda di Kabupaten Blitar	Satpol PP
			d	% Peningkatan kerjasama dalam penegakan hukum	%	50%	0%	Satpol PP memaksimalkan peran PPNS Satpol PP dalam penyelesaian pelanggaran Perda	Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait khususnya kejaksaan dalam pengambilan keputusan penyelesaian pelanggaran Perda	Satpol PP
	Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	a	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Personil	250	70	Belum adanya solusi terkait penambahan anggota Satpol PP	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait serta Satpol PP di wilayah lain yang telah berhasil merekrut anggota Satpol PP	Satpol PP
			b	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Linmas	62	65	Anggota Linmas yang terealisasi adalah Linmas berdasarkan TPS	Perekrutan Linmas yang sudah terbentuk berdasarkan TPS untuk memaksimalkan peran sertanya dalam menjaga tantribum dan ketenteraman masyarakat di wilayahnya (tidak hanya bertugas pada saat Pilkada, Pemilu, Pileg)	Satpol PP
			c	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Pos	7046	2153	Di tiap RT belum semuanya tersedia Pos Siskamling; Keberadaan Pos Siskamling yang sudah ada dimaksimalkan fungsi keberadaannya	Pengusulan untuk pembangunan Pos Siskamling di tiap RT; melalui perlombaan Siskamling diharapkan masyarakat mempunyai semangat dalam memaksimalkan pentingnya keberadaan Siskamling	Satpol PP
			d	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Patroli dalam sehari	3x	2x		Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan solusi penambahan personil Satpol PP serta berkoordinasi dengan wilayah lain yang sudah berhasil dalam perekrutan Satpol PP yang baru	Satpol PP

NO	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Permasalahan	Solusi	SKPD Penanggung jawab	
			(Titik Nol)		2014					
					Target Indikator	Capaian				
1	URUSAN WAJIB									
19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM									
	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Kriminal	Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum	a	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Linmas	7046	7452	Anggota Linmas yang terealisasi adalah Linmas berdasarkan TPS	Perekrutan Linmas yang sudah terbentuk berdasarkan TPS untuk memaksimalkan peran sertanya dalam menjaga tantribum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya (tidak hanya bertugas pada saat Pilkada, Pemilu, Pileg)	Satpol PP
			b	Angka kriminalitas	Kasus	150	377	Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda; Pemberian sanksi yang kurang tegas	Intensitas operasi penegakan perda terus ditingkatkan disertai peningkatan sosialisasi dan penyuluhan Perda di Kabupaten Blitar; peningkatan kerjasama dengan intansi terkait utamanya dengan kejaksaan dalam penyelesaian keputusan penindakan pelanggaran Perda dengan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku	Satpol PP
	Program Penanggulangan Masalah Sosial	Meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman masyarakat	a	Angka kriminalitas yang tertangani	%	90%	100%	Tidak jelasnya batasan ranah hukum yang berlaku antara Satpol PP dan Polri; kurang terjalannya kerjasama antar aparat penegak hukum	Kecepatan Satpol PP dalam merespon tindak pelanggaran Perda menjadikan keberhasilan capaian kinerja dalam penanganan kriminalitas	Satpol PP
			b	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	90%	100%	Pemberian sanksi yang kurang tegas	Peningkatan kerjasama dengan PPNS SKPD terkait dan Kejaksaan dalam pengambilan keputusan penyelesaian pelanggaran K3	
	Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenraman masyarakat	Tercapainya kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	1	Jumlah Personil yang mengikuti pelatihan gabungan	%	58%	75%	Pada Tahun 2014 Satpol PP hanya melakukan pelatihan dengan aparat TNI pada saat pelaksanaan persiapan HUT dan Jambore	Kerjasama dalam pengembangan kemampuan aparat Pol PP lebih ditingkatkan selain pada kegiatan HUT dan Jambore saja	Satpol PP

NO	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014		Permasalahan	Solusi	SKPD Penanggung jawab	
			(Titik Nol)		Target Indikator	Capaian				
1	URUSAN WAJIB									
19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM									
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya suasana yang terkendali, kodusif di wilayah Kab. Blitar untuk menunjang proses pembangunan daerah	1	Pembinaan keamanan di Wilayah Kab. Blitar		1 paket / th	1	kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan pada masyarakat; kurangnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program pembinaan	Meskipun terealisasi 100% akan tetapi intensitas pembinaan keamanan pada masyarakat lebih ditingkatkan lagi	Satpol PP
	Dukungan kelancaran Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015	Terwujudnya pengamanan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015	1	Pengamanan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015		3 paket keg	-	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar terlaksana pada tahun 2016	Pelatihan pengamanan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati bisa diawali pada Tahun 2015	Satpol PP
		Terwujudnya penyelenggaraan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015	2	Fasilitasi kelancaran Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan lancar dan tertib		3 paket keg	-	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar terlaksana pada tahun 2016		
		Terkendalnya dukungan kelancaran penyelenggaraan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015	3	Kajian Akademik Penyelenggaraan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan lancar dan tertib		1 paket keg	-	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar terlaksana pada tahun 2016		

NO	Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Permasalahan	Solusi	SKPD Penanggung jawab	
			(Titik Nol)		2014					
					Target Indikator	Capaian				
1	URUSAN WAJIB									
19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM									
	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap gangguan keamanan serta mengoptimalkan potensi Linmas yang ada di daerah untuk membantu korban bencana alam yang terjadi sewaktu-waktu	1	Jumlah kegiatan		1 kali keg	1	Tidak terpantaunya keberadaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (Linmas); Tidak terfasilitasi keberadaan pembangunan Pos jaga / Ronda; kurangnya pelatihan tenaga keamanan lingkungan.	Meskipun terealisasi 100% akan tetapi intensitas pembinaan keamanan pada masyarakat lebih ditingkatkan lagi	

KEPALA SATUAN POLISI PRAJA
KABUPATEN BLITAR

TOHA MASHURI,S.Sos,MM.

Pembina Tingkat I
NIP.19700219 199003 1 002